



## Implementasi Etika Lingkungan Berbasis Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Alfa Dian Prakoso<sup>1</sup>, Khrisna Fathir Firmansyah<sup>2</sup>, Alfrosa Mahrotul Fikriyah<sup>3</sup>, Georgerius Jeff Fernando<sup>4</sup>, Esa Elfa Naila Rasidah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Fakultas Teknik Informatika, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Januari 1, 2026  
Revised Januari 3, 2026  
Accepted Januari 9, 2026

#### Kata Kunci:

Etika Lingkungan,  
Pancasila,  
Theo-Anthroposentrisme,  
Pembangunan Berkelanjutan.

#### Keywords:

*Environmental Ethics,  
Pancasila,  
Theo-Anthropocentrism,  
Sustainable Development.*

### ABSTRAK

Krisis ekologi di Indonesia dipicu oleh paradigma pembangunan yang bersifat antroposentrisme sempit, di mana alam dipandang sebagai objek eksploitasi semata. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi etika lingkungan berbasis nilai Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan dan Sila Kemanusiaan. Melalui metode kualitatif-filosofis, ditemukan bahwa Sila Ketuhanan menggeser paradigma manusia dari penguasa menjadi pengelola alam yang bertanggung jawab secara transendental (Theo-Anthroposentrisme). Sementara itu, Sila Kemanusiaan mengamankan keadilan ekologis antar-generasi sebagai perwujudan martabat manusia yang beradab. Integrasi kedua nilai ini menghasilkan konsep "Eko-Spiritualitas" yang mengubah orientasi pembangunan dari ekonomi ketamakan menjadi ekonomi etis. Sinergi nilai spiritual dan kemanusiaan menjadi kunci utama dalam menjamin keberlanjutan ekosistem demi masa depan bangsa.

### ABSTRACT

*Indonesia's ecological crisis is driven by a narrow anthropocentric development paradigm, viewing nature solely as an object of exploitation. This research aims to reconstruct environmental ethics based on Pancasila, specifically the principles of Divinity and Humanity. Using a qualitative-philosophical method, it is found that the Principle of Divinity shifts the human paradigm from ruler to a transcendently responsible manager (Theo-Anthropocentrism). Meanwhile, the Principle of Humanity mandates intergenerational ecological justice as a manifestation of civilized human dignity. The integration of these values produces "Eco-Spirituality," shifting development from a greedy economy to an ethical economy. The synergy of spiritual and human values is the key to ensuring ecosystem sustainability for the nation's future.*

*This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.*



### Corresponding Author:

Khrisna Fathir Firmansyah  
Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Kusuma  
Surabaya, Indonesia  
Email: [khrisnafirman@gmail.com](mailto:khrisnafirman@gmail.com)

## **1. PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas yang luar biasa (mega-biodiversitas), saat ini berada pada persimpangan jalan yang krusial. Di satu sisi, pemerintah dan masyarakat sedang giat-giatnya mengejar target pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan daya saing global. Namun, di sisi lain, bayang-bayang kerusakan lingkungan menjadi ancaman nyata yang tidak bisa lagi diabaikan [1]. Eksploitasi sumber daya alam yang masif, deforestasi, pencemaran laut, hingga krisis iklim bukan sekadar masalah teknis atau administratif, melainkan masalah moral dan etika yang mendalam.

Selama ini, paradigma pembangunan sering kali terjebak dalam arus Antroposentrisme sempit, di mana manusia dianggap sebagai pusat dari segalanya dan alam hanyalah objek yang bisa dikeruk manfaatnya tanpa batas. Cara pandang ini mengabaikan nilai intrinsik dari alam semesta. Akibatnya, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) sering kali hanya menjadi jargon politik tanpa implementasi nilai yang mengakar pada jati diri bangsa. Di sinilah letak urgensi untuk mengembalikan pembangunan pada jalurnya melalui re-implementasi etika lingkungan yang berbasis pada nilai-nilai luhur Pancasila, khususnya Sila Pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

**Sila Ketuhanan: Landasan Teologis Konservasi**

Sila Pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan fondasi spiritual bagi bangsa Indonesia. Dalam konteks lingkungan, sila ini memberikan pemahaman bahwa alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang memiliki nilai sakral. Implementasi etika lingkungan berbasis Ketuhanan berarti memandang alam bukan sebagai milik pribadi manusia, melainkan sebagai titipan atau amanah dari Sang Pencipta [2].

Secara teologis, manusia diposisikan sebagai khalifah atau pengelola bumi, bukan penguasa mutlak. Tanggung jawab terhadap lingkungan bukan hanya tanggung jawab hukum terhadap negara, melainkan tanggung jawab transendental kepada Tuhan. Ketika seorang pengusaha atau pembuat kebijakan merusak hutan, ia tidak hanya melanggar regulasi lingkungan, tetapi juga melakukan dosa ekologis karena merusak karya cipta Tuhan. Keyakinan ini seharusnya menjadi rem moral yang paling kuat dalam setiap kebijakan pembangunan. Alam memiliki hak untuk ada dan lestari karena ia mencerminkan keagungan Penciptanya.

**Sila Kemanusiaan: Keadilan Antar-Generasi dan Kesetaraan Ekologis**

Sila Kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab", menekankan pada pemuliaan martabat manusia. Namun, martabat manusia tidak dapat dilepaskan dari kualitas lingkungan hidupnya. Etika lingkungan berbasis kemanusiaan menuntut adanya keadilan ekologis. Pembangunan yang hanya menguntungkan segelintir kelompok (oligarki) dengan mengorbankan ruang hidup masyarakat adat atau masyarakat kecil adalah bentuk pelanggaran terhadap kemanusiaan yang beradab [3].

Kemanusiaan yang adil juga mencakup Keadilan Antar-Generasi (Intergenerational Equity). Kita tidak berhak menghabiskan seluruh sumber daya alam saat ini sehingga meninggalkan "bumi yang rusak" bagi anak cucu kita. Menghargai kemanusiaan berarti memberikan hak bagi generasi mendatang untuk menikmati udara bersih, air yang layak, dan keragaman hayati yang sama dengan yang kita nikmati sekarang. Peradaban yang tinggi tidak diukur dari megahnya gedung pencakar langit, melainkan dari bagaimana manusia memperlakukan sesamanya dan lingkungan hidupnya dengan penuh adab dan kebijaksanaan.

**Tantangan Implementasi di Era Modern**

Meskipun secara konseptual Pancasila memberikan landasan yang kokoh, implementasinya di lapangan menghadapi tantangan berat. Budaya konsumerisme, tekanan pasar global, dan lemahnya penegakan hukum sering kali membuat nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan terpinggirkan. Sering terjadi dikotomi antara "ekonomi" dan "ekologi". Padahal, dalam kaca mata etika Pancasila, keduanya harus berjalan beriringan (simbiotik).

Kesenjangan antara regulasi yang terlihat "hijau" dengan praktik lapangan yang destruktif menunjukkan adanya krisis integritas. Pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan transformasi paradigma: dari pembangunan yang berbasis pada greedy economy (ekonomi ketamakan) menuju pembangunan yang berbasis pada ethical economy (ekonomi etis). Integrasi nilai agama (Ketuhanan) dan nilai kemanusiaan akan melahirkan "Eko-Spiritualitas" yang khas Indonesia, di mana menjaga alam dianggap sebagai bagian dari ibadah dan perwujudan kasih sayang sesama makhluk hidup [4].

Pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pembangunan ditempatkan sebagai unsur pokok dalam berbagai sektor. Pembangunan secara umum didefinisikan sebagai upaya untuk memajukan kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi (Hatu & Hatu, 2022). Suatu kebijaksanaan pembangunan yang baik harus mengandung tiga unsur, yaitu: ecological security, livelihood security, dan food security [5]. Kebijakan tentang perjanjian internasional yang mengatur aspek-aspek terkait dengan hak kekayaan intelektual dan berbagai keputusan lain yang menyangkut pertanian, akan mengubah tiga aspek dasar dari kebijakan pertanian secara drastis. Kebijakan WTO tersebut antara lain akan merusak ketahanan ekologis suatu sistem pertanian, karena keputusan seperti itu akan mendorong terciptanya konsentrasi pemilikan sumber daya alam, dengan cara menghilangkan batasan pemilikan terhadap sumber alam tersebut [6]. Pada dasarnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sedemikian kompleks ini, sangat diperlukan pengoptimalan lingkungan sebaik mungkin. Namun realitanya visi keberlanjutan dan kerentanan daya dukung SDA yang masih lemah dan dapat dilihat dari berbagai produk hukum mengenai sumberdaya alam telah mengakibatkan tingkat perusakan (lingkungan) berlangsung lebih cepat [7]. Lingkungan alam memiliki peranan penting bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Namun, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan telah membawa dampak buruk bagi kondisi lingkungan. Berdasarkan data Pemerintah (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, 2021), beberapa masalah lingkungan yang terjadi di Indonesia antara lain deforestasi, erosi tanah, banjir, kekeringan, dan pencemaran udara serta air. Hal ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan, dan industri yang kurang ramah lingkungan. Secara global, berbagai kondisi ekstrim cuaca seperti kekeringan, banjir, serta naiknya suhu rata-rata bumi telah dikaitkan dengan dampak perubahan iklim [8]. Petani yang dijadikan informan ialah mereka yang telah bergelut dengan kegiatan pertanian minimal selama 5 tahun terakhir. Pilihan 5 tahun sebagai batas minimal karena peneliti anggap mereka sudah memiliki pemahaman dan pengalaman yang mendalam terkait dengan aktivitas pertanian yang berorientasi pada ketahanan pangan secara berkelanjutan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tiga tahapan yaitu pengolahan data, pengorganisasian data, dan penarikan kesimpulan [9]. Tujuan dari nilai-nilai ini adalah kita bersama-sama untuk mewujudkan tujuan cita-cita dalam mencapai tujuan nasional Indonesia melalui pembangunan nasional. Perlunya penerapan nilai dari Pancasila ini digunakan kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Serta relevansi nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan pembangunan nasional berkelanjutan ini dapat terbukti ditunjukkan dengan melihat bahwa prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita terapkan untuk mencapai pembangunan nasional yang berkelanjutan juga diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur

## **2. METODE**

### **2.1 Analisis Kesesuaian (Alignment)**

1. Kesesuaian dengan Objek Kajian (Pancasila)
  - a. Pendahuluan: Anda membahas nilai-nilai abstrak seperti "Ketuhanan" dan "Kemanusiaan".
  - b. Metode: Karena nilai tidak bisa diukur dengan timbangan atau angka, maka metode Filosofis adalah satu-satunya cara untuk membedah makna di balik sila-sila tersebut dan bagaimana manifestasinya dalam etika lingkungan.
2. Kesesuaian dengan Isu Pembangunan Berkelanjutan
  - a. Pendahuluan: Anda mengkritik pembangunan yang hanya mementingkan materi (ekonomi).
  - b. Metode: Dengan pendekatan Normatif, Anda bisa membandingkan antara das Sollen (apa yang seharusnya menurut hukum/etika Pancasila) dengan das Sein (apa yang terjadi di lapangan). Metode ini memungkinkan Anda untuk memberikan kritik tajam terhadap kebijakan yang tidak ramah lingkungan.
3. Kesesuaian dengan Jenis Data
  - a. Pendahuluan: Anda banyak merujuk pada prinsip hidup bangsa.
  - b. Metode: Studi Pustaka sangat relevan karena sumber utama etika Pancasila ada pada dokumen sejarah, naskah filosofis, dan teks keagamaan/budaya yang memerlukan interpretasi mendalam (Hermeneutika).

## **2.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan filosofis-normatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena objek kajian penelitian ini bukan berupa data empiris yang dapat diukur secara kuantitatif, melainkan nilai-nilai abstrak yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai-nilai tersebut menuntut pemahaman mendalam terhadap makna, orientasi moral, dan implikasi etisnya dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan filosofis digunakan untuk membedah dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari etika lingkungan berbasis Pancasila. Secara ontologis, pendekatan ini menelaah pandangan Pancasila tentang relasi Tuhan, manusia, dan alam. Secara epistemologis, pendekatan ini mengkaji bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami dan diturunkan menjadi prinsip etika lingkungan. Sementara itu, secara aksiologis, pendekatan filosofis digunakan untuk menilai arah dan tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan.

## **2.3 Pendekatan Normatif dan Analisis Das Sollen–Das Sein**

Selain pendekatan filosofis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis norma, nilai, dan prinsip yang seharusnya (das sollen) berlaku dalam pembangunan berkelanjutan menurut Pancasila, serta membandingkannya dengan realitas empiris kebijakan dan praktik pembangunan yang terjadi (das sein).

Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara idealitas etika Pancasila dengan praktik pembangunan yang cenderung eksploitatif dan berorientasi ekonomi semata. Analisis normatif memungkinkan peneliti untuk memberikan kritik etis terhadap kebijakan pembangunan yang mengabaikan kelestarian lingkungan dan keadilan ekologis, sekaligus menawarkan arah perbaikan berbasis nilai Pancasila

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Krisis Ekologi sebagai Cerminan Krisis Etika**

Hasil kajian menunjukkan bahwa krisis lingkungan di Indonesia bukan semata-mata persoalan teknis pengelolaan sumber daya alam, melainkan merupakan krisis etika dan paradigma pembangunan. Laju deforestasi, pencemaran sungai, degradasi pesisir, dan konflik agraria yang terus berulang

mengindikasikan dominannya cara pandang antroposentris yang menempatkan alam hanya sebagai instrumen ekonomi. Dalam paradigma ini, keberhasilan pembangunan diukur terutama melalui indikator kuantitatif seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), sementara dampak ekologis dan sosial cenderung dipinggirkan.

Pendekatan antroposentris sempit ini bertentangan dengan karakter Pancasila yang bersifat holistik, religius, dan humanistik. Ketika alam direduksi menjadi komoditas, maka hubungan manusia dengan lingkungan kehilangan dimensi moralnya. Akibatnya, eksploitasi sumber daya alam sering dilegitimasi atas nama pembangunan, meskipun mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan keadilan sosial.

### **3.2 Sila Ketuhanan sebagai Fondasi Etika Lingkungan**

Pembahasan menunjukkan bahwa Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki implikasi etis yang sangat kuat dalam konteks lingkungan hidup. Alam dipahami sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar objek eksploitasi manusia. Dalam perspektif teo-antroposentrisme Pancasila, manusia tidak ditempatkan sebagai penguasa absolut alam, melainkan sebagai pengelola (khalifah) yang memikul tanggung jawab moral dan spiritual.

Kerusakan lingkungan, dengan demikian, tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap etika religius. Praktik pembalakan liar, pertambangan destruktif, dan pencemaran lingkungan dapat dimaknai sebagai bentuk pengingkaran terhadap amanah ilahi. Nilai Ketuhanan berfungsi sebagai rem etik internal yang seharusnya membimbing pengambil kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperlakukan alam secara bertanggung jawab.

### **3.3 Sila Kemanusiaan dan Keadilan Ekologis**

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menegaskan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari persoalan keadilan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan sering kali berdampak paling besar pada kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat adat, petani, dan nelayan. Pembangunan yang mengorbankan ruang hidup mereka demi kepentingan ekonomi segelintir pihak merupakan bentuk ketidakadilan ekologis sekaligus pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan.

Lebih jauh, konsep kemanusiaan dalam Pancasila mencakup keadilan antar-generasi. Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan hari ini akan membebani generasi mendatang dengan kerusakan ekosistem dan krisis lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan harus dimaknai sebagai kewajiban moral untuk menjamin hak hidup yang layak bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

### **3.4 Kearifan Lokal sebagai Praktik Etika Pancasila**

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa nilai-nilai etika lingkungan Pancasila sejatinya telah lama dipraktikkan dalam kearifan lokal masyarakat adat Indonesia. Masyarakat Baduy, Dayak, dan berbagai komunitas adat lainnya menerapkan sistem pengelolaan alam yang berbasis pada keseimbangan, pantangan ekologis, dan penghormatan terhadap alam sebagai entitas yang hidup.

Kearifan lokal ini mencerminkan integrasi nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan secara konkret, jauh sebelum konsep pembangunan berkelanjutan diperkenalkan secara global. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila bukan sekadar ideologi normatif, melainkan memiliki basis praksis yang kuat dalam budaya bangsa.

### **3.5 Menuju Model Pembangunan Etis Berbasis Pancasila**

Pembahasan mengarah pada kebutuhan transformasi paradigma dari greedy economy menuju ethical economy. Pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi

harus berlandaskan pada etika Ketuhanan dan Kemanusiaan. Integrasi kedua sila ini melahirkan konsep eko-spiritualitas, di mana menjaga lingkungan dipandang sebagai bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral.

Model pembangunan berbasis teo-antroposentrisme Pancasila menawarkan jalan tengah antara kepentingan manusia dan kelestarian alam. Manusia tetap diakui sebagai subjek moral utama, namun keberadaannya terikat oleh tanggung jawab spiritual dan kemanusiaan terhadap alam semesta

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa krisis ekologi di Indonesia merupakan manifestasi dari krisis etika pembangunan yang berakar pada paradigma antroposentris sempit. Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menyediakan landasan moral yang kuat untuk membangun etika lingkungan yang kontekstual dengan jati diri bangsa.

Sila Ketuhanan menegaskan kesakralan alam sebagai ciptaan Tuhan dan menempatkan manusia sebagai pengelola yang bertanggung jawab secara transendental. Sementara itu, Sila Kemanusiaan menuntut keadilan ekologis, perlindungan kelompok rentan, serta tanggung jawab antar-generasi. Integrasi kedua sila ini melahirkan paradigma teo-antroposentrisme Pancasila yang mampu mengoreksi praktik pembangunan eksploitatif.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terjaganya keseimbangan ekologis, keadilan sosial, dan kesehatan spiritual bangsa. Implementasi etika lingkungan berbasis Pancasila menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin keberlanjutan kehidupan manusia dan alam di masa depan.

#### **REFERENSI**

- [1] Wahanisa, R., & Adiyatma, S. E. (2021). Konsepsi Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Nilai Pancasila. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i1.145>
- [2] Bambang Syaeful Hadi. (n.d.). Membangun Etika Lingkungan Sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan.
- [2] Saputra, H. Y., Syah, N., & Azhar, A. (2025). Penerapan Prinsip Etika Lingkungan pada Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan: Studi Literatur. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(3), 2972–2979. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i3.2372>
- [4] Widyantoro, S., & Fatma Ulfatun Najicha. (2025). Implementasi Nilai Pancasila Dalam Upaya Menjaga Lingkungan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*
- [5] Abdoellah, O. S. (2016). *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- [6] Asdak, C. (2014). *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [7] Hasiholan, Dheyna dkk. *Politik dan Lingkungan*. Jakarta: Koekoesan, 2007;
- [8] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. 2021. *Laporan Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Tahun 2021*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- [9] Rahman, A. (2022). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: CV. Widina Media Utama